



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MERINTANGI HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN TERPIDANA FREDRICH YUNADI DAN STUDI PUTUSAN TERPIDANA LUCAS)

Oleh:

Yedidja Samuel Aspin¹, Muhammad Fatahillah Akbar²

INTISARI

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pada kasus Fredrich Yunadi dan putusan pada kasus Lucas terkait tindakan merintang hukum oleh advokat serta menganalisis gambaran pengaturan tindak pidana merintang hukum apabila dilakukan oleh advokat di Indonesia yang lebih mendalam.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif.

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, pada kasus Fredrich Yunadi dan Lucas, di mana hakim mempertimbangkan tindakan advokat yang menghambat penyidikan dan pemeriksaan dalam kasus korupsi. Fredrich Yunadi dinyatakan bersalah dan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali memperkuat keputusan tersebut, sedangkan Lucas dinyatakan bebas karena kurangnya bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatannya dapat dikatakan sebagai tindakan merintang hukum. Kedua, perbandingan pengaturan tindak pidana merintang hukum antara Indonesia, Prancis, dan Jerman, terutama dalam konteks kasus korupsi. Prancis dan Jerman memiliki undang-undang yang lebih spesifik dalam mengatasi tindakan merintang hukum serta memberikan pemberatan pidana kepada pelaku yang terlibat dalam pengungkapan kebenaran. Pengadopsian prinsip-prinsip hukum dari Prancis dan Jerman di masa depan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan konsep pengaturan tindak pidana merintang hukum yang lebih efektif, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menjalankan tugas dalam menegakkan hukum, seperti advokat.

Kata Kunci: Merintang Hukum, Advokat, Korupsi.

¹ Mahasiswa Strata-1 (S-1), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



***LEGAL REVIEW OF ILLEGAL OBSTRUCTION ACTIONS AND THE
RESPONSIBILITY OF LAWYERS IN CORRUPTION CRIMES (A STUDY OF
THE CONVICTIONS OF FREDRICH YUNADI AND LUCAS)***

By:

Yedidja Samuel Aspin³, Muhammad Fatahillah Akbar⁴

ABSTRACT

The purpose of this Legal Writing is to understand and analyze the legal considerations of judges in the verdicts of the cases involving Fredrich Yunadi and Lucas, regarding the act of obstruction of justice by lawyers. It also aims to provide a deeper analysis of the regulatory framework concerning the crime of obstruction of justice when committed by lawyers in Indonesia.

This legal research is descriptive in nature, utilizing the normative or literature-based legal research method. The data obtained from this research is analyzed using a qualitative method and presented through a descriptive approach.

Based on the problem formulation, research findings, and discussions, two conclusions can be drawn. First, in the cases of Fredrich Yunadi and Lucas, the judges took into consideration lawyers actions that obstructed the investigation and examination in corruption cases. Fredrich Yunadi was found guilty, and the appellate, cassation, and review verdicts reinforced that decision. On the other hand, Lucas was acquitted due to insufficient evidence that proves that their actions can be considered as obstructing the law. Second, a comparison of the regulation on the crime of obstruction of justice between Indonesia, France, and Germany, particularly in the context of corruption cases. France and Germany have more specific laws in addressing obstruction of justice and impose heavier penalties on individuals involved in truth disclosure. The adoption of legal principles from France and Germany in the future could serve as a reference for developing a more effective regulatory concept of obstruction of justice, especially in corruption cases involving parties who should be responsible for upholding the law, such as lawyers.

Keywords: *Obstruction Of Justice, Lawyers, Corruption*

³ Mahasiswa Strata-1 (S-1), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.